



EKONOMI

Indonesia Sejahtera dan Berkeadilan Sosial

Fondasi Institusi dan Dua Pilar Menuju Cita-Cita Konstitusi

PENULIS

Titik Anas, Rizki Nauli Siregar, Abraham Pardede, Elan Satriawan, Mervin Goklas Hamonangan, Rimawan Pradiptyo, Talitha Chairunissa, Teuku Riefky, Vid Adrison, dan Vivi Alatas

Ekonomi | Indonesia Sejahtera dan Berkeadilan Sosial: Fondasi Institusi dan Dua Pilar Menuju Cita-Cita Konstitusi

Penulis : Titik Anas, Rizki Nauli Siregar, Abraham Pardede, Elan Satriawan, Mervin Goklas Hamonangan, Rimawan Pradiptyo, Talitha Chairunissa, Teuku Riefky, Vid Adrison, dan Vivi Alatas.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan kepada penyelenggara negara untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial. Risalah Kebijakan ini mengejawantahkan amanat tersebut ke dalam dua pilar yang saling menopang: **Pilar 1**, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, yang hanya dapat dicapai melalui pertumbuhan berbasis inovasi dan sumber daya manusia; dan **Pilar 2**, perlindungan sosial yang inklusif menjangkau seluruh individu rentan sejak Seribu Hari Pertama Kehidupan hingga lanjut usia. Kedua pilar ini hanya akan berjalan di atas fondasi stabilitas makro ekonomi, kredibilitas serta independensi lembaga negara, perbaikan kualitas institusi/kelembagaan dan partisipasi masyarakat sipil.

Sebelas temuan dalam Risalah Kebijakan ini menunjukkan Indonesia belum berpijak kokoh pada kedua pilar tersebut. Kesejahteraan dasar belum tercapai. Sumber daya manusia belum memadai. Kualitas dan keberlanjutan ekonomi masih lemah. Perlindungan sosial belum sepanjang hayat dan berbasis permintaan. *Exclusion error* dalam sistem perlindungan sosial masih besar. Banyak kebijakan tidak dirancang dengan baik dan tanpa didukung bukti yang kredibel; sehingga mengarah pada misalokasi sumber daya termasuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, pemotongan Transfer Ke Daerah dan lain sebagainya. Ekosistem usaha belum ramah untuk pengusaha baru dan pengembangan inovasi. Kita juga tahu bahwa Pandemi Covid19 telah menyebabkan kemunduran dalam berbagai ukuran kesejahteraan dan capaian pembangunan. Kita juga belum siap menghadapi dampak perubahan iklim serta bencana alam. Dan akhir-akhir ini stabilitas makro juga tercederai. Kredibilitas dan independensi institusi yang menopang perekonomian yang sehat dilemahkan.

Tulisan ini melanjutkan advokasi Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) sejak satu tahun lalu. **Tujuh Desakan Darurat Ekonomi (7DDE)** yang diusung AEI mendesak perlunya **koreksi segera** atas misalokasi sumberdaya dan rapuhnya kualitas institusi karena konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak amanah. Sementara itu, Indonesia memiliki pekerjaan rumah besar untuk mendorong pembangunan inklusif yang berkelanjutan terutama di tengah perubahan struktural besar seperti perubahan ekosistem rantai nilai global dengan hadirnya berbagai teknologi yang dapat memiliki dampak negatif pada berbagai segmen masyarakat, upaya mengatasi *scarring effect* dari pandemi COVID-19 serta perubahan iklim. Tulisan ini berkontribusi untuk mengingatkan penyelenggara negara maupun masyarakat atas tantangan nyata yang Indonesia hadapi. Tantangan ini sering terlewat karena gaduhnya penurunan kualitas tata kelola, kebijakan

publik maupun program-program pemerintah akhir-akhir ini sehingga mengalihkan fokus kita pada hal-hal mendesak untuk diperbaiki.

Untuk itu, kami mengusulkan beberapa **rekomendasi jangka menengah** untuk membangun kapasitas struktural dengan iklim usaha yang *contestable* sehingga mendorong pertumbuhan produktivitas yang nyata, ekosistem usaha yang menumbuhkan inovasi, sumber daya manusia yang berkualitas, ketangguhan terhadap perubahan iklim dan bencana, kemampuan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta sistem perlindungan sosial sepanjang hayat yang *agile* menjadi keniscayaan bernegara.

Kami juga mengusulkan **rekomendasi jangka panjang** untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berkualitas, inklusif dan berkelanjutan, perlindungan sosial sepanjang hayat, serta fondasi stabilitas makro ekonomi, kredibilitas lembaga negara dan independensi institusi sebagai arsitektur lintas siklus politik dan pemerintahan agar Indonesia bergerak mendekati cita-cita konstitusionalnya.

PENDAHULUAN

Pembukaan UUD 1945 menetapkan mandat konstitusional negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mandat ini adalah upaya menuju Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Setiap pemerintahan terikat pada mandat yang sama, apa pun warna politik, prioritas jangka pendeknya, maupun kontribusi pada pembangunan jangka panjangnya.

Mandat tersebut harus diimban dalam berbagai situasi termasuk saat kondisi eksternal yang menantang dan sarat ketidakpastian seperti saat ini. Ketidakpastian global ini semakin menuntut perekonomian Indonesia yang terbuka dan dikelola secara baik dan matang agar tetap tangguh terhadap guncangan eksternal dan kokoh secara struktural untuk terus bergerak menuju kesejahteraan dan keadilan sosial.

Selain kondisi eksternal yang semakin menuntut setiap negara untuk mampu mengatasi krisis multidimensi, Indonesia juga masih memiliki pekerjaan rumah yang belum tuntas dan memerlukan perhatian dan prioritas kebijakan untuk dapat mendekatkan Indonesia pada cita-cita konstitusionalnya. Banyak studi menunjukkan berbagai isu struktural seperti melemahnya kualitas sumber daya manusia dalam bentuk *learning loss* (Hata dkk, 2024; Maddawin dkk, 2024; Purnamasari dkk, 2022), besarnya beban utang publik akibat akumulasi utang dalam 10 tahun terakhir dengan meningkatnya belanja publik secara signifikan tanpa peningkatan kapasitas penerimaan (LPEM FEB UI, 2025), lesunya pasar tenaga kerja (Ridhwan dkk, 2021), dan memburuknya kondisi pendapatan, pengeluaran maupun tabungan masyarakat (Ridhwan dkk, 2024) sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Selain itu berbagai perkembangan teknologi saat ini yang memiliki potensi untuk tidak hanya menjadi komplemen untuk para pekerja tapi juga memiliki resiko nyata menggantikan berbagai peran pekerja (misalnya Acemoglu and Restrepo, 2019 dan Hampole dkk, 2025). Perubahan teknologi yang dapat mentransformasi ekosistem rantai nilai ini menuntut navigasi yang baik dalam bentuk kebijakan publik yang aktif mendorong keterlibatan inovasi dan penggunaan

teknologi secara beretika namun juga memberi bantalan untuk segmen masyarakat terdampak atas resiko-resiko yang mereka hadapi.

Perlu juga disadari bahwa ada kebutuhan untuk berbagai reformasi kebijakan dan program yang mendesak dan juga memiliki dampak jangka panjang sehingga perlu dilakukan segera. Hal ini dikarenakan terjadinya misalokasi sumber daya yang masif dan tata kelola yang tidak amanah saat ini menimbulkan dua biaya (Gupta dkk, 2026). Biaya pertama adalah biaya langsung seperti ketidaktepatan kebijakan dan program sehingga menjadi sumberdaya yang terbuang. Biaya kedua adalah biaya dari segala permasalahan yang tidak tertangani dan kesempatan yang hilang dari distraksi dari apa yang seharusnya menjadi solusi.

Data dan analisis ekonomi sesungguhnya sudah cukup lama menunjukkan pergeseran arah pergerakan pembangunan ekonomi yang menjauhkan kita dari cita-cita konstitusi. Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) telah menyuarakan secara publik kekhawatiran tersebut sejak satu tahun lalu dengan disampaikannya Tujuh Desakan Darurat Ekonomi (7DDE). Namun, arah kebijakan dan pengelolaan negara akhir-akhir ini terlihat semakin menjauhkan Indonesia dari negara yang sejahtera dan berkeadilan yang ditandai oleh sejumlah indikator kunci yang memburuk. Untuk dapat menjadi pengingat akan pekerjaan-pekerjaan rumah besar kita bersama, risalah kebijakan ini berkontribusi pada pemikiran bagaimana merawat Indonesia agar tetap konsisten dengan tujuan masa depan bernegara.

Tulisan ini secara khusus menyoroti strategi jangka menengah dan panjang untuk mencapai Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Dua pilar penting yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang keadilan sosial adalah pertumbuhan yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan; dan perlindungan sosial yang inklusif. Kedua pilar ini harus ditopang oleh fondasi institusi yang kredibel dan amanah. Tulisan terkait kondisi ekonomi hari ini disajikan dalam Tulisan Bab 12.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui pertumbuhan berbasis inovasi dan sumber daya manusia sehingga memerlukan ekosistem inovasi yang berfungsi, investasi sumber daya manusia yang memadai, serta keselarasan pembangunan dengan kelestarian. Sementara itu, perlindungan sosial yang inklusif diperlukan untuk menjangkau seluruh individu rentan sejak Seribu Hari Pertama Kehidupan hingga lanjut usia diperlukan untuk memastikan tidak ada satu orang Indonesia pun yang tertinggal. Kedua pilar ini memerlukan fondasi yang kuat, yaitu stabilitas makro, kredibilitas kelembagaan, dan independensi institusi, serta partisipasi masyarakat sipil yang bermakna.

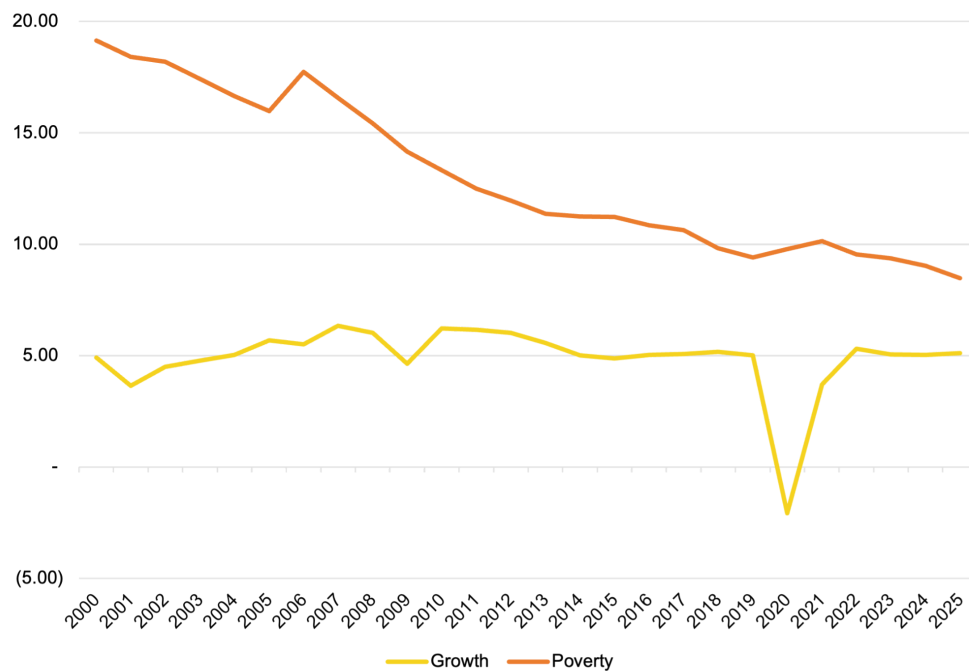
TEMUAN DAN ANALISIS

Temuan 1. Kesejahteraan dasar belum tercapai

Kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945, tidak cukup diukur dari laju pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) semata, melainkan harus tercermin pada pendapatan riil yang diterima rumah tangga, kemampuan negara menekan kemiskinan dan kesenjangan secara berkelanjutan, serta kualitas lapangan kerja yang tersedia bagi angkatan kerja. Apakah pertumbuhan yang selama ini dicapai sungguh-sungguh menyejahterakan rakyat? Bukti pada empat indikator pendapatan per kapita, kemiskinan dan kesenjangan, pengangguran

dan upah, menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh dari cita-cita konstitusi. Indonesia juga tertinggal dari negara ASEAN yang sepadan.

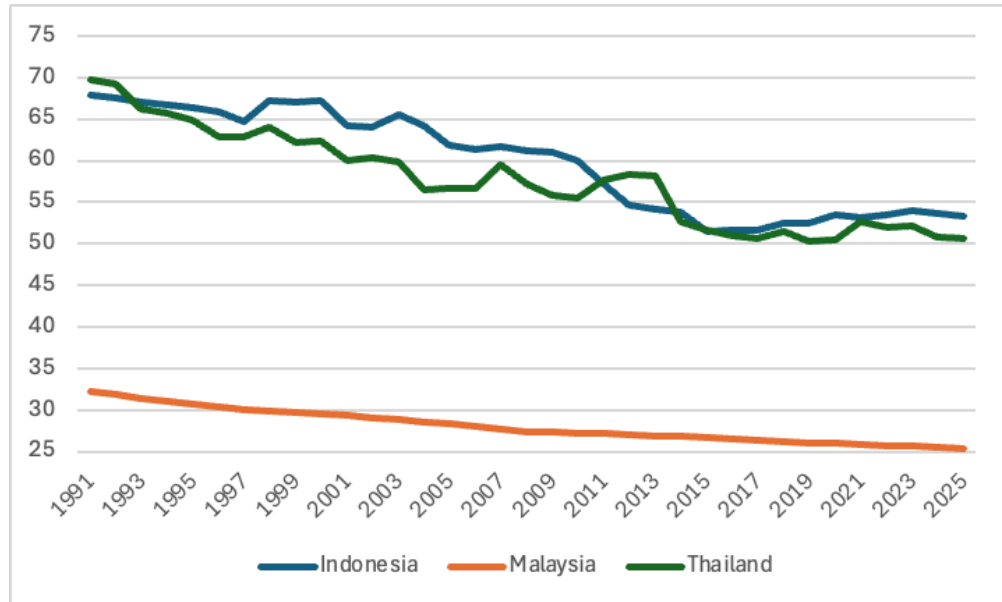
- a) Bila dilihat dari berbagai indikator kemiskinan, Indonesia mulai kehilangan momentum perbaikannya. Laju penurunan kemiskinan yang terus mengecil dari tahun ke tahun memberikan sinyal bahwa elastisitas pertumbuhan terhadap kemiskinan sedang menurun secara struktural (Grafik 11.1).



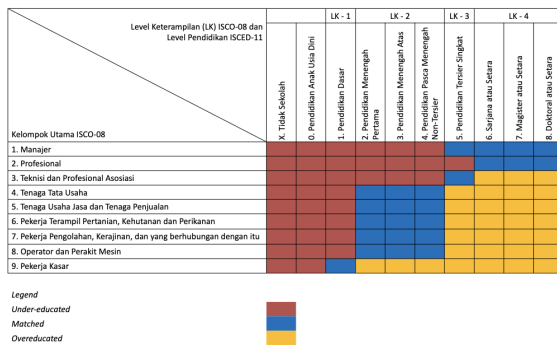
Grafik 11.1. Tren Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan (%)

Sumber: BPS, Bank Dunia

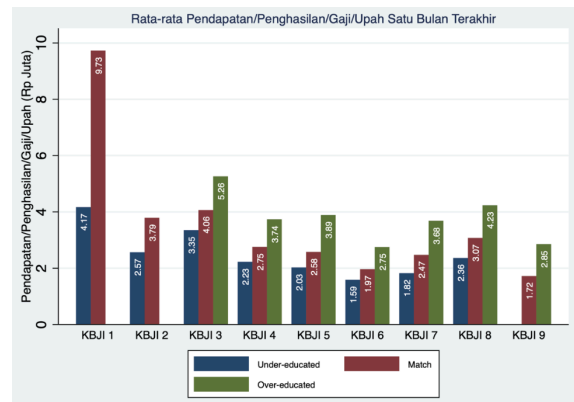
Dominasi sektor informal dan lebarnya kesenjangan upah menurut jenjang pendidikan menunjukkan hal yang sama dari sisi pasar kerja: pertumbuhan menciptakan lapangan kerja, tetapi sebagian besar bermutu rendah dan bergaji tidak proporsional terhadap peningkatan produktivitas nasional (Grafik 11.2). Kesenjangan upah antar tingkat pendidikan semakin mengecil pada Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia 9 (KBJI 9), yakni pekerjaan dasar dan paling timpang pada pekerjaan manajerial (KBJI 1) (Grafik 11.3).



Grafik 11.2. Tren Proporsi Tenaga Kerja Self-Employed
Sumber: Bank Dunia



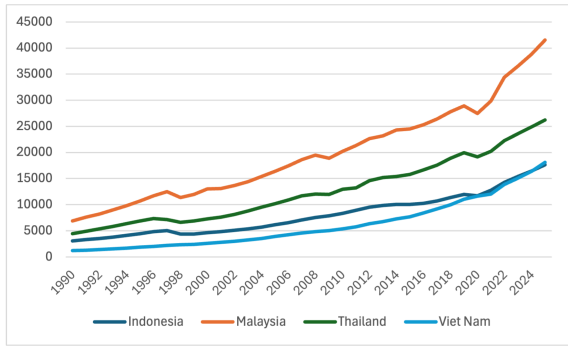
Grafik 11.3a. Korespondensi antara Pendidikan dan Jabatan Berdasarkan Kebutuhan Pendidikan



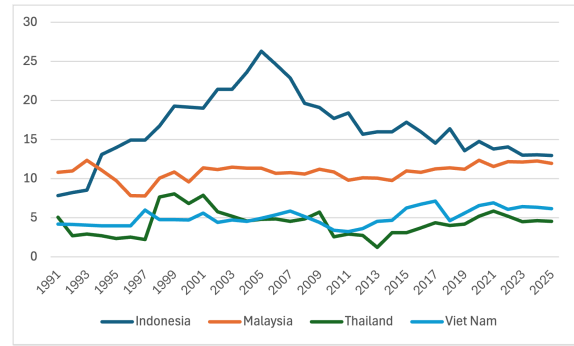
Grafik 11.3b. Rata-rata Pendapatan/Penghasilan/Gaji/Upah Satu Bulan Terakhir

Sumber: LPEM, Sakernas Agustus 2023 (diolah)

- b) Pertumbuhan pendapatan per kapita berada dibawah trajektori negara sebaya di kawasan. Pertumbuhan tersebut pun tidak diiringi dengan daya yang serupa dalam menekan pengangguran di usia muda. Laju pengurangan tingkat pengangguran usia muda melandai selepas era COVID-19, mencirikan pertumbuhan yang masih belum optimal dalam meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan pekerjaan untuk menyerap angkatan kerja muda (Grafik 11.4).



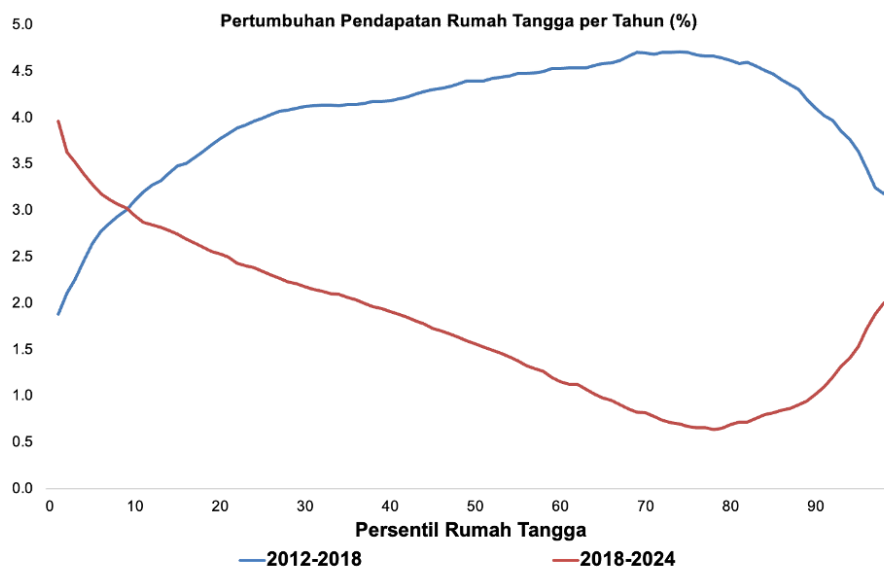
Grafik 11.4a. Tren Pendapatan per Kapita Beberapa Negara ASEAN



Grafik 11.4b. Tren Pengangguran Usia Muda Beberapa Negara ASEAN

Sumber: Bank Dunia

- c) Pertumbuhan pendapatan rumah tangga kelas menengah dan *aspiring middle class* melambat (Grafik 11.5).



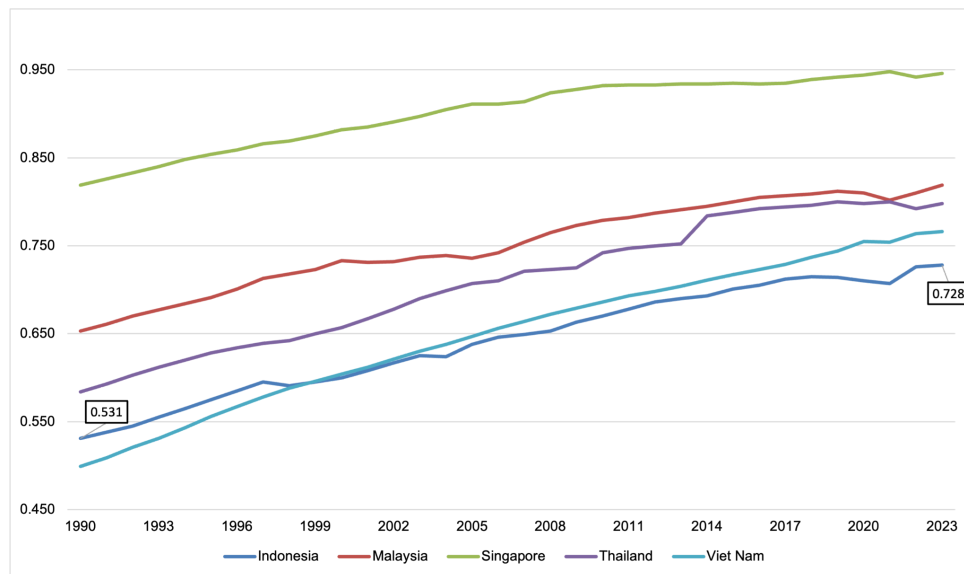
Grafik 11.5. Growth Incidence Curve

Sumber: BPS, diolah

Temuan 2. Sumber daya manusia belum memadai

Dalam kerangka pertumbuhan berkualitas, modal manusia merupakan faktor penting yang membentuk kapasitas berinovasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi. Tanpa basis modal manusia yang memadai, transfer teknologi dari investasi asing cenderung berhenti pada tahap perakitan bernilai tambah rendah, tanpa pernah beranjak ke penguasaan dan modifikasi teknologi yang akan mendorong produktivitas jangka panjang. Secara historis, capaian Indonesia dalam memperluas akses pendidikan formal sesungguhnya tidak buruk bila dilihat dari angka partisipasi sekolah yang terus meningkat. Persoalannya ada pada kualitas pendidikan yang masih

perlu terus ditingkatkan mengingat anak-anak Indonesia tidak menguasai kompetensi dasar sesuai jenjang pendidikannya, sebagaimana PISA score anak-anak Indonesia pada tahun 2022 lalu (OECD,2022). Berdasarkan HDI, kualitas sumber daya manusia masih tertinggalnya dibandingkan negara-negara peers. Ini menunjukkan belum cukupnya keberpihakan dan keseriusan pada investasi sumber daya manusia (Grafik 11.6).



Grafik 11.6. Human Development Index: Beberapa Negara ASEAN
Sumber: UNDP

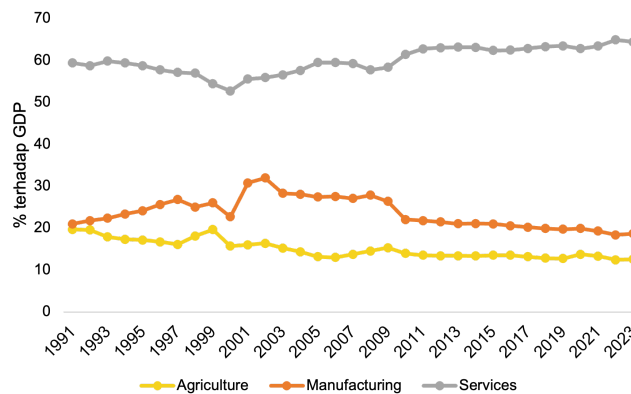
Konstitusi mewajibkan negara mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen APBN untuk pendidikan (Pasal 31 ayat 4 UUD 1945). Namun mandat besar di atas kertas ini tidak banyak berarti ketika realisasinya justru diarahkan menjauh dari inti persoalan mutu pembelajaran. Pada APBN 2026, pemerintah melalui Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang APBN 2026 memasukkan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Badan Gizi Nasional sebagai bagian dari komponen 20 persen anggaran pendidikan wajib tersebut. Ini mencederai cita-cita pembentukan modal manusia yang kuat. Aliansi Ekonom Indonesia dan juga banyak lembaga lain telah melontarkan kritik terhadap salah alokasi ini. Puncaknya adalah saat Mahkamah Konstitusi memutuskan skema ini inkonstitusional dan melarang MBG menggunakan anggaran pendidikan pada Juli 2026. Namun putusan tersebut baru berlaku efektif paling lambat pada APBN 2028, sehingga anggaran pendidikan 2026 dan 2027 tetap terbuka terhadap pengalihan serupa. Ini akan memperlambat upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia.

Temuan 3. Lemahnya Kualitas dan keberlanjutan pertumbuhan

Pola pertumbuhan Indonesia beberapa tahun terakhir ini menyerupai apa yang oleh Rodrik (2016) disebut sebagai *premature deindustrialization*: pangsa manufaktur terhadap PDB mulai menyusut pada tingkat pendapatan per kapita yang jauh lebih rendah dibandingkan pengalaman historis negara maju. Berbeda dari Vietnam yang mempertahankan momentum transformasi struktural ke manufaktur padat teknologi, Indonesia justru bergerak ke arah sektor primer: kembali bertumpu pada komoditas dan sektor ekstraktif. Pola ini rentan terhadap guncangan *terms-of-trade* dan minim limpahan produktivitas ke sektor lain.

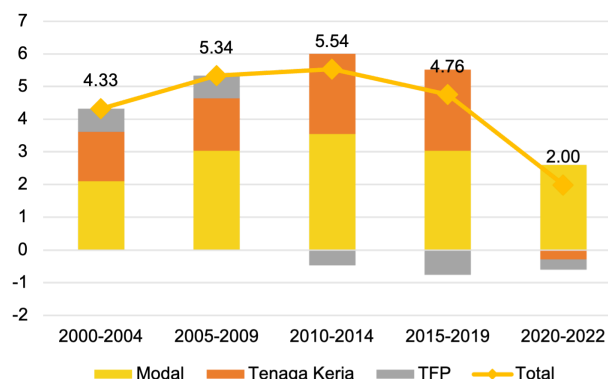
Bila dilihat kontribusi Total Factor Productivity (TFP) terhadap pertumbuhan PDB Indonesia, nyaris nol. Ini menandakan hampir seluruh pertumbuhan Indonesia berasal dari akumulasi faktor produksi, bukan efisiensi penggunaannya. Pola semacam ini menghadapi batas alamiah berupa imbal hasil modal yang menurun (*diminishing returns to capital*). Indonesia mungkin akan terjebak dalam *middle-income trap*: mampu keluar dari kemiskinan absolut, namun tertahan sebelum mencapai status berpendapatan tinggi karena tidak pernah menuntaskan transisi dari pertumbuhan berbasis faktor produksi menuju pertumbuhan berbasis inovasi.

- a) Berbagai ukuran proporsi sektoral di Indonesia menunjukkan indikasi adanya deindustrialisasi prematur (Grafik 11.7).



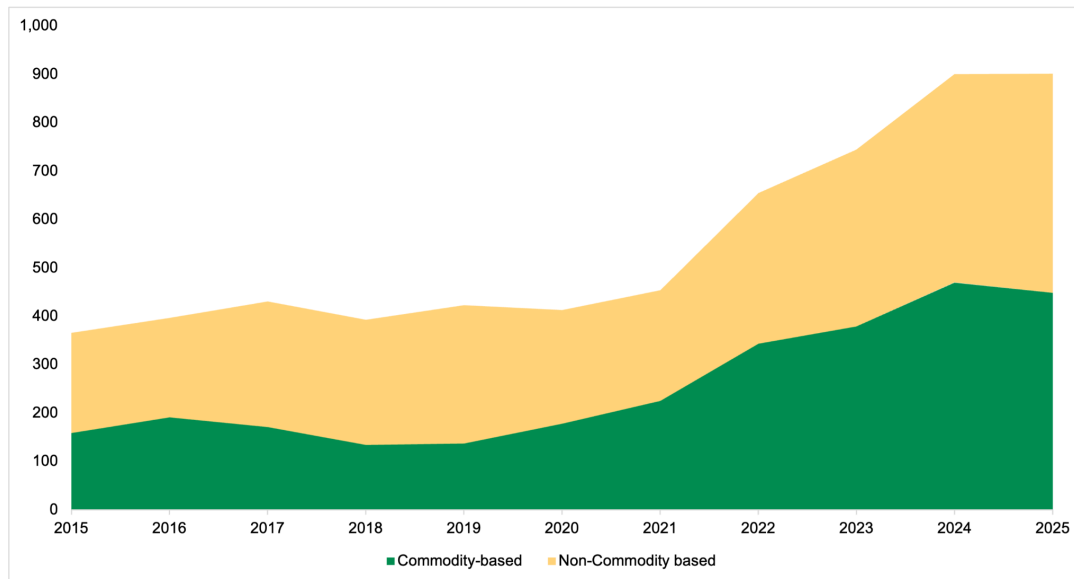
Grafik 11.7. Nilai Tambah Berdasarkan Sektor (% dari PDB)
Sumber: World Bank, Diolah

- b) Pertumbuhan ekonomi didorong oleh akumulasi faktor produksi dengan tren kontribusi dari pertumbuhan teknologi atau TFP yang mengecil dan bahkan negatif di 15 tahun terakhir (Grafik 11.8).



Grafik 11.8. Dekomposisi Pertumbuhan Output
Sumber: Data APO (2023)

- c) Industri berbasis komoditas semakin dominan dalam perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat misalnya dari sisi penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia (Grafik 11.9).



Grafik 11.9. FDI Indonesia: Komoditas vs Non-Komoditas (Rp triliun)

Sumber: BKPM, Perhitungan LPEM FEB UI

Temuan 4. Perlindungan sosial belum sepanjang hayat dan berbasis permintaan

Kerangka perlindungan sosial modern, sebagaimana dianjurkan Bank Dunia dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) melalui pendekatan siklus hidup (*life-cycle approach to social protection*), mensyaratkan sistem yang mampu merespons risiko berbeda pada setiap fase kehidupan, mulai dari Seribu Hari Pertama Kehidupan, usia sekolah, usia produktif, hingga usia lanjut, sebagai satu kesatuan arsitektur yang saling terhubung. Sistem perlindungan sosial seperti itu masih jauh dari terwujud di Indonesia. Indonesia tidak memiliki mekanisme yang memungkinkan individu mengakses perlindungan kapanpun dibutuhkan sepanjang siklus hidupnya. Penduduk usia produktif yang kehilangan pekerjaan tidak memiliki jaring pengaman yang memadai. Penduduk lanjut usia yang kehilangan penghasilan banyak yang tidak memiliki sistem pensiun.

Persoalan ini akan segera menjadi ujian nyata mengingat jendela bonus demografi diproyeksikan mulai menyempit sekitar 2030 hingga 2035, ketika rasio ketergantungan mulai naik tajam. Jendela bonus demografi menjadi potensi yang tersia-siakan, pada saat angka pengangguran untuk lulusan universitas program tertentu bisa mencapai lebih dari 40%, dan hanya sekitar 1.7% dari anak usia 19-25 yang berhasil mendapatkan pekerjaan dengan upah dan perlindungan yang cukup memadai di atas *cut off middle class jobs*. Tanpa upaya serius yang sistematis dan berkesinambungan untuk mewujudkan sistem perlindungan sepanjang hayat yang inklusif, beban menopang penduduk lanjut usia akan jatuh secara tidak proporsional kepada generasi produktif, sementara negara belum memiliki mekanisme sistemik untuk menyerap sebagian beban tersebut. Dalam kerangka ini, "tidak ada yang tertinggal" masih menjadi cita-cita normatif, bukan desain sistem yang sudah berjalan.

Temuan 5. *Exclusion error* dalam sistem perlindungan sosial masih besar dan pemanfaatan dari produk perlindungan risiko masih rendah.

Berbagai kajian atas implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menemukan *exclusion error* dan *inclusion error* sehingga kelompok rentan yang berhak tidak terjangkau sistem dan kelompok yang tidak berhak mendapatkan bantuan dari negara. Hal ini merupakan akibat dari data yang jarang dimutakhirkan dan lemahnya verifikasi lapangan. Dampak nyata dari kelemahan ini dirasakan masyarakat ketika Covid-19 melanda.

Belajar dari pengalaman Covid-19, pemerintah melakukan konsolidasi data dengan membangun Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Bahwa basis data sebesar ini dapat dirampungkan dalam tiga bulan pertama pemerintahan merupakan capaian kelembagaan yang baik. Namun demikian, evaluasi pemerintah sendiri menunjukkan bahwa persoalan salah sasaran belum tuntas, bahkan pasca transisi ke DTSEN. Menyatukan tiga data DTKS, Regsosek dan P3KE tidak menjadikan kualitas ketepatan sasaran menjadi lebih baik, bukan hanya sebagian besar data dikumpulkan sudah cenderung *out-of-dated* namun juga jumlah variabel *overlap* yang lebih sedikit menjadikan modeling tidak akan menghasilkan hasil yang lebih baik dari model sebelumnya.

Kementerian Sosial pada Februari 2026 mengungkapkan bahwa masih terdapat lebih dari 54 juta jiwa pada kelompok masyarakat termiskin, yang belum menerima Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional, sementara sekitar 15 juta jiwa kelompok kaya masih tercatat sebagai penerima. Dewan Ekonomi Nasional turut mencatat sekitar 45 persen penyaluran Program Keluarga Harapan dan bantuan pangan diduga tidak tepat sasaran (PANRB, 2026). Ini menunjukkan bahwa kecepatan pemutakhiran dan verifikasi lapangan yang mengikuti perubahan kondisi ekonomi keluarga secara riil, serta konsistensi antar program dalam menggunakan basis data yang sama masih menjadi tantangan. Lebih dari sekedar pendataan tradisional *door-to-door*, sistem pemutakhiran ke depan perlu memanfaatkan teknologi dan AI, yang dipadukan dengan mekanisme *on-demand*.

Selain itu, masyarakat belum memiliki bantalan dalam menghadapi berbagai risiko secara menyeluruh. Cakupan asuransi dan manfaat masih rendah dan sangat beragam (Tabel 11.1). Asuransi pensiun misalnya kurang dari 50% dari pekerja di pemerintah dan hanya mencakup 0,18% dari pekerja dari usaha rumahan. Kesenjangan serupa juga terlihat pada asuransi hari tua, yang cakupannya hanya 30,39% di sektor swasta dan kurang dari 1% di usaha rumahan. Pola ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap risiko jangka panjang jauh lebih timpang dibandingkan perlindungan risiko jangka pendek seperti asuransi kesehatan, sehingga pekerja informal dan usaha rumahan pada dasarnya nyaris tidak memiliki bantalan sama sekali saat memasuki usia tua.

Tabel 11.1. Cakupan Asuransi Berdasarkan Jenis dan Manfaat, 2024

Jenis Asuransi/Manfaat	Pemerintah	Swasta	Usaha Rumahan	Lainnya
Asuransi Sosial Terkait Pekerjaan				
Asuransi Kesehatan	75,24%	68,68%	2,48%	30,57%

Asuransi Kecelakaan	62,67%	63,52%	2,07%	23,81%
Asuransi Kematian	54,70%	40,96%	0,83%	14,66%
Asuransi Hari Tua	51,51%	30,39%	0,57%	9,87%
Pensiun	48,64%	12,29%	0,18%	4,83%
Asuransi Pengangguran	9,58%	7,84%	0,21%	2,05%
Manfaat				
Cuti Tahunan/Hamil	63,42%	43,73%	4,51%	26,54%
Cuti Sakit/Menstruasi	58,04%	40,35%	6,66%	27,58%
Memenuhi Upah Minimum	56,69%	59,70%	11,84%	24,53%
Memiliki Kontrak	95,21%	73,69%	4,25%	47,44%

Sumber: BPS, diolah.

Temuan 6. Banyak kebijakan tidak dirancang dengan baik dan tanpa berbasis analisis dampak yang kredibel sehingga mengarah pada misalokasi sumberdaya termasuk MBG, KDMP, Pemotongan TKD, dan lain sebagainya.

Berbagai program utama pemerintah sebenarnya didasari oleh permasalahan yang valid. Namun, desain solusi yang dipilih serta implementasinya tidak berdasarkan proses pembuatan kebijakan berbasis dampak yang kredibel (Gupta dkk, 2026). Hal ini dapat memperparah misalokasi sumberdaya termasuk misalokasi anggaran pada saat kondisi ruang fiskal yang ketat serta melemahkan tatanan institusi.

Kekhawatiran atas misalokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hal baru. Aliansi Ekonom Indonesia (2025) telah menyuarakan persoalan ini secara publik sejak satu tahun sebelum kajian ini disusun, dan temuan tersebut juga diperkuat oleh sejumlah kajian independen dari berbagai institusi akademik dan riset kebijakan. Kajian komprehensif Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI Secretariat, 2025a) menemukan bahwa regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan MBG, sejak tahap awal implementasinya, sangat terbatas cakupannya dan tidak tersosialisasikan secara memadai kepada kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, maupun mitra strategis pelaksanaan.

CISDI Secretariat (2025b) turut mendokumentasikan bahwa program berjalan selama delapan bulan tanpa payung hukum setingkat peraturan presiden, dan atas dasar itu merekomendasikan moratorium serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Temuan yang sejalan dikemukakan oleh Satriawan dan Nugroho (2025) yang menyimpulkan bahwa ekspansi MBG berjalan dengan ambisi kebijakan yang tinggi namun minim presisi dalam penargetan penerima manfaat, sehingga berisiko menjadi preseden kebijakan yang mahal secara fiskal sekaligus mengikis kepercayaan publik terhadap efektivitas program pemerintah. Pertanyaan yang perlu di

jawab oleh Pemerintah mengenai MBG, apa permasalahan yang ingin diatasi dengan MBG, apakah permasalahan tersebut memang dimiliki oleh seluruh siswa sehingga memerlukan program yang berlaku secara universal sehingga menjadikannya begitu mahal dan menggerus alokasi untuk berbagai macam permasalahan lain yang lebih membutuhkan alokasi anggaran.

Temuan 7. Ekosistem usaha yang belum ramah untuk berinovasi.

Berbagai studi mengenai hal-hal yang menjadi faktor pendorong pada berbagai episode pertumbuhan tinggi yang dilalui oleh negara-negara berkembang menuju status negara maju menunjukkan peran sentral dari inovasi (misalnya Cherif dan Hasanov, 2025). Namun, berbagai indikator terkait aktivitas dan kedalaman inovasi di Indonesia menunjukkan bahwa inovasi belum menjadi aspek yang intensif dilakukan baik oleh perusahaan maupun dalam perekonomian secara agregat. Iklim usaha yang kurang ramah untuk berinovasi juga disebabkan besarnya biaya usaha yang dihadapi pelaku usaha di Indonesia (*high cost economy*).

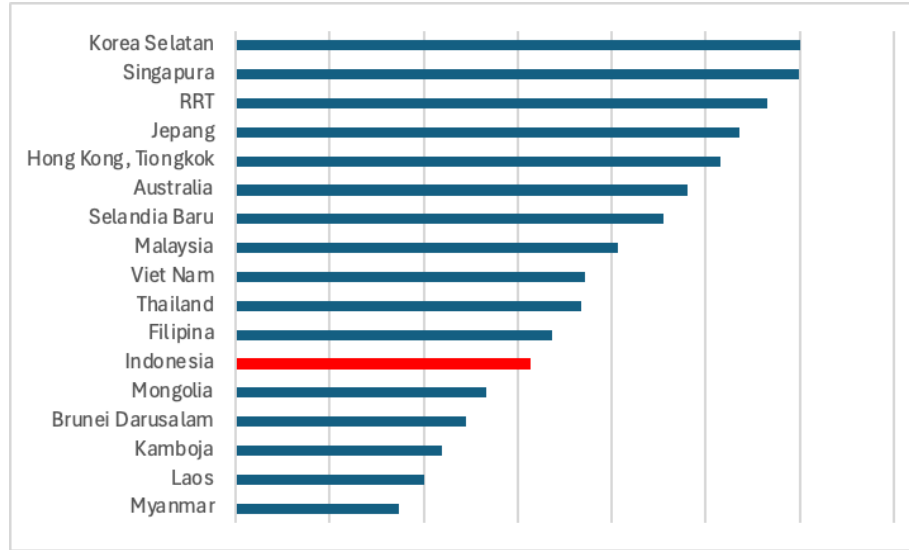
- a) Data World Bank Enterprise Survey menunjukkan porsi perusahaan yang melakukan inovasi proses maupun inovasi produk di Indonesia sangat rendah, bahkan dibandingkan negara tetangga (Tabel 11.2).

Tabel 11.2. Proporsi Perusahaan Pelaku Inovasi (%), Beberapa Negara ASEAN

Indikator	Kelompok	Indonesia	Filipina	Vietnam
Usaha yang memperkenalkan produk/jasa baru dalam kurun waktu tiga tahun terakhir	Semua usaha	5.5	19.3	7.5
	Eksportir	5.7	37.8	9.1
	Non-eksportir	4.8	18.8	7.5
Usaha yang melakukan inovasi proses dalam kurun waktu tiga tahun terakhir	Semua usaha	2.9	9.5	7.5
	Eksportir	0.2	8.1	13.5
	Non-eksportir	2.1	9.6	7.1

Sumber: WBES, Bank Dunia

- b) Indonesia menempati peringkat ke-12 dari 17 negara Asia Tenggara, Asia Timur, dan Oceania dalam indeks inovasi (Grafik 11.10).



Grafik 11.10. Peringkat Global Innovation Index Indonesia berbanding Negara Regional Sekitar
Sumber: WIPO

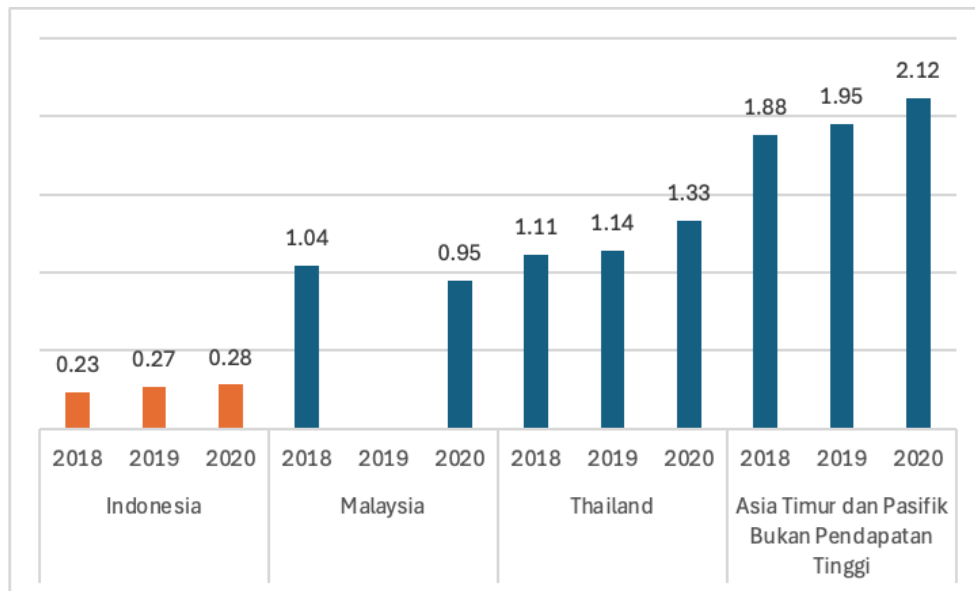
- c) Pelaku usaha di Indonesia menghadapi berbagai hambatan usaha terkait korupsi. Persentase perusahaan yang menghadapi insiden penyuapan lebih tinggi di Indonesia dibandingkan negara-negara di Asia Timur dan Pasifik (Tabel 11.3). Persentase ini juga lebih tinggi untuk perusahaan skala besar yang umumnya justru relatif lebih produktif.

Tabel 11.3. Hambatan Terkait Korupsi yang Dihadapi oleh Perusahaan

Skala Usaha berdasarkan Jumlah Karyawan	Indonesia 2023	Indonesia 2009	Asia Timur dan Pasifik 2023	Seluruh Negara 2023
Insiden Penyuapan (% Perusahaan yang mengalami setidaknya satu permintaan pembayaran suap)				
Kecil (5-19)	15.5	24.6	13.7	11.1
Menengah (20-99)	23.9	34.2	15.9	11.4
Besar (100+)	35.4	33.3	18.6	10.7
Kedalaman Penyuapan (% transaksi publik yang mendapatkan permintaan pembayaran suap atau hadiah)				
Kecil (5-19)	9.7	21.3	10.8	9.0
Menengah (20-99)	18.4	29.9	12.4	8.6
Besar (100+)	30.1	21.7	14.5	7.9
% Perusahaan yang diharapkan untuk memberikan hadiah atau suap ke pejabat publik untuk menyelesaikan sesuatu				
Kecil (5-19)	26.9	12.9	16.5	12.3
Menengah (20-99)	34.3	28.2	20.0	13.9
Besar (100+)	39.1	35.5	21.1	13.9
% Perusahaan yang diharapkan untuk memberikan hadiah atau suap ke pejabat publik untuk mendapat izin konstruksi				
Kecil (5-19)	16.3	38.0	17.2	15.2
Menengah (20-99)	39.4	25.4	16.5	13.9
Besar (100+)	60.9	72.3	29.6	14.2
% Perusahaan yang diharapkan untuk memberikan hadiah atau suap ke pejabat publik untuk mendapat izin operasional				
Kecil (5-19)	4.5	25.2	8.6	8.1
Menengah (20-99)	22.1	29.5	8.3	8.0
Besar (100+)	44.0	26.0	20.5	8.0

Sumber: World Bank, diolah oleh LPEM FEB UI

- d) Pengeluaran untuk riset Indonesia lebih kecil dibandingkan rata-rata negara Asia/emerging countries (Grafik 11.11).



Grafik 11.11. Pengeluaran Riset Kawasan Asia Pasifik

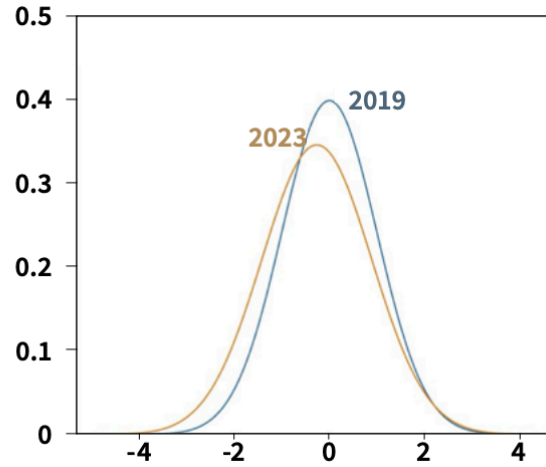
Sumber: Bank Dunia

Temuan 8. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan kemunduran dalam berbagai ukuran kesejahteraan dan capaian pembangunan.

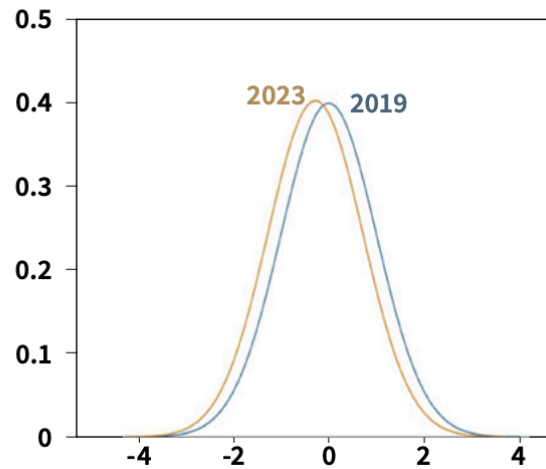
Beberapa studi menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah menyebabkan berbagai kemunduran dalam capaian pembangunan. Misalnya dalam hal investasi sumber daya manusia, capaian pembelajaran menurun dengan adanya *learning loss* ((Hata dkk, 2024; Maddawin dkk, 2024; Purnamasari dkk, 2022). Selain itu, masyarakat juga mengalami penurunan pendapatan, konsumsi, maupun tabungan (Ridhwan dkk, 2024). Pandemi juga berdampak pada pasar tenaga kerja (Ridhwan dkk, 2021). Dengan adanya *scarring effect* dari pandemi maka pembangunan perlu diperkaya dengan kebijakan dan program yang bukan *business as usual* untuk dapat mengembalikan perekonomian pada *trajectory* awal sebelum pandemi terjadi. Lambatnya pemulihan dapat memperlebar ketertinggalan kita dengan negara-negara lain sehingga dapat melemahkan daya saing Indonesia secara umum.

- a) Distribusi skor matematika dan bahasa bergeser ke kiri dari tahun 2019 ke 2023 menunjukkan penurunan skor pada sebagian besar distribusi siswa (Grafik 11.12).

Language

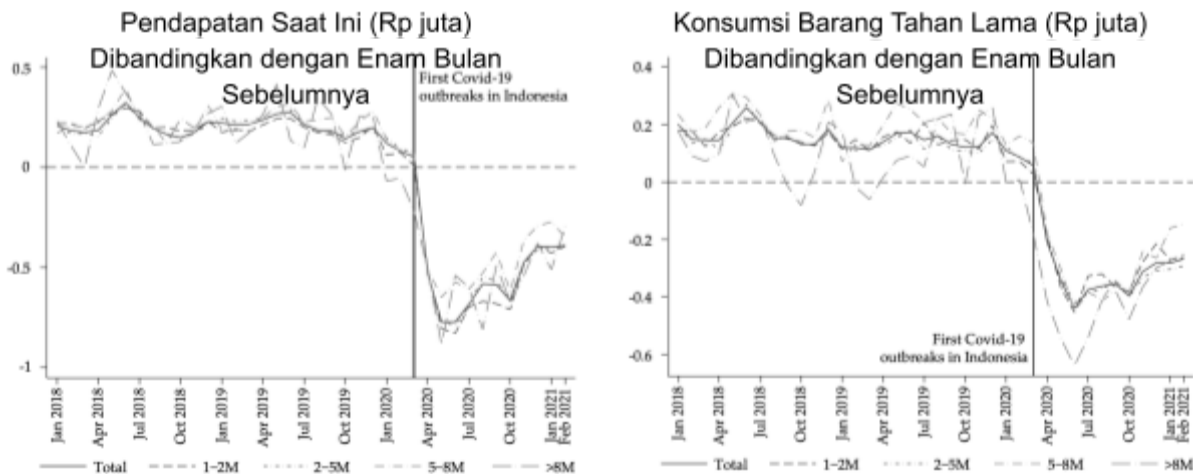


Mathematics



Grafik 11.12. Distribusi Skor Matematika dan Bahasa
Sumber: Hata dkk (2024).

- b) Masyarakat mengalami penurunan pendapatan, konsumsi, maupun tabungan (Grafik 11.13) (Ridhwan dkk, 2024).

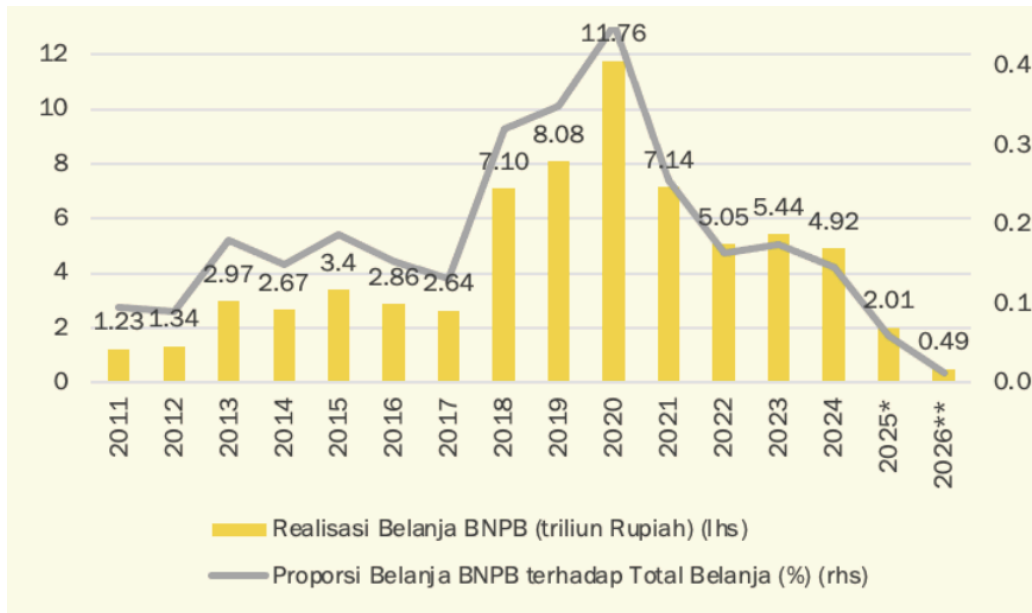


Grafik 11.13. Kesejahteraan yang Menurun
Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia (Ridhwan dkk, 2024)

Temuan 9. Indonesia belum siap menghadapi dampak perubahan iklim serta bencana alam.

Indonesia memiliki dua misi besar dalam jangka menengah dan panjang. Pertama, Indonesia perlu tumbuh dengan inklusif dan berkualitas. Kedua, Indonesia memiliki target penurunan emisi sebagai bagian dari upaya membangun perekonomian yang berkelanjutan. Dua misi besar ini sangat terkait dengan kemampuan Indonesia untuk beradaptasi dan memitigasi dampak dari perubahan iklim. Sebagai negara kepulauan, kenaikan permukaan air laut maupun semakin memanasnya laut dapat berdampak bukan hanya pada perekonomian maritim namun juga masyarakat pesisir termasuk industri dan kawasan urban. Sebagai negara dengan salah satu biodiversitas terbesar dan hutan hujan tropis penting dunia, maka konservasi harus dapat sejalan dengan pembangunan dan justru menjadi kunci dari keberlanjutan. Pemanasan global maupun cuaca ekstrem dapat memberi dampak negatif pada produktivitas berbagai sektor, bukan hanya sektor agrikultur. Selain itu, Indonesia masih tergantung dengan bahan bakar fosil dalam pemenuhan sumber daya energinya sehingga pemenuhan target Net-Zero Emission perlu perubahan tata kelola energi yang fundamental dan menyeluruh. Banyak isu terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ini perlu kebijakan yang holistik dan lekat antar siklus pemerintahan.

Sebagai negara yang rentan dengan bencana, baik karena efek cuaca ekstrem dari perubahan iklim, maupun posisi Indonesia di *Ring of Fire*, anggaran publik untuk bencana sangat kecil. Proporsinya dalam APBN pun mencapai titik terendahnya sejak 2010 (Grafik 11.14). Dalam APBN 2026, anggaran BNPB hanya sebesar IDR490 miliar, setara dengan 0,01% dari total belanja APBN, turun signifikan dari hanya beberapa tahun sebelumnya yang mencapai IDR5,44 triliun di 2023 (LPEM FEB UI, 2026).

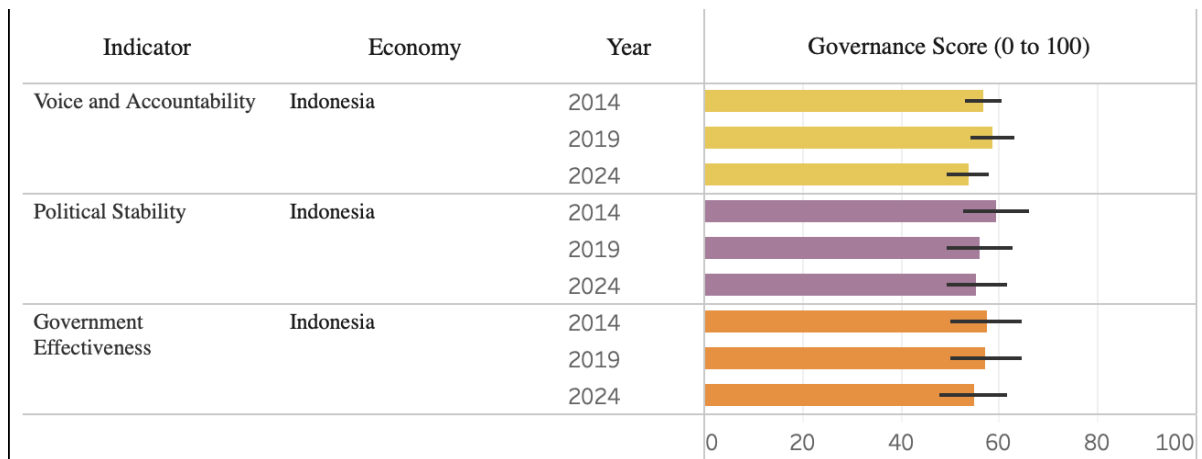


Grafik 11.14. Realisasi Belanja BNPB (triliun Rupiah) dan Proporsi terhadap APBN (%)
Sumber: LKPP dan CEIC, diolah oleh LPEM FEB UI

Temuan 10. Rubuhnya Integritas Lembaga Negara (*institutional decay*)

Literatur ekonomi kelembagaan (North, 1990; Acemoglu & Robinson, 2012) menegaskan bahwa pertumbuhan dan pemerataan bukan sekadar fungsi dari kebijakan sektoral yang tepat, melainkan juga dari kapasitas negara dan kredibilitas kelembagaan yang menopangnya: institusi yang kredibel menekan biaya transaksi dan ketidakpastian, sehingga investasi jangka panjang, baik oleh pelaku usaha domestik, investor asing, maupun rumah tangga yang menabung untuk pendidikan anak, menjadi rasional untuk dilakukan. Pada kenyataannya, fondasi ini justru tercederai oleh pola kebijakan yang tidak berpijak pada bukti (*evidence-based policy/EBP*) dan tidak sinkron antar waktu, tercermin pada empat bukti berikut.

- a) Kabinet besar tanpa basis meritokrasi yang jelas: Kabinet Merah Putih beranggotakan 118 orang (7 menteri koordinator, 42 menteri, 58 wakil menteri, 11 pejabat setingkat menteri), yaitu hampir dua kali lipat kabinet sebelumnya (34 menteri, 18 wakil menteri), dan mengalami tiga kali *reshuffle* dalam tahun pertama (Sekretariat Kabinet dan Kantor Wakil Presiden, 2026). Ukuran kabinet yang membengkak tanpa basis kompetensi yang transparan bukan sekadar soal efisiensi anggaran, melainkan sinyal bagi kapasitas negara untuk mengkoordinasikan kebijakan lintas kementerian secara koheren, prasyarat bagi kedua pilar yang keduanya bersifat multisektoral.
- b) Berdasarkan data *world governance indicators* yang disusun oleh World Bank, Indonesia mengalami penurunan kualitas institusi (Grafik 11.15). Kondisi ini dicerminkan oleh memburuknya tiga indikator utama, yaitu *voice and accountability*, *political stability*, dan *government effectiveness*. Penurunan ini terjadi dalam 10 tahun terakhir di mana ketiga Indikator ini memburuk sejak tahun 2014.



Grafik 11.15. Penurunan Kualitas Institusi
Sumber: World Bank

Temuan 11. Stabilitas Makro Tercederai

- a) Stabilitas makro tercederai: pada pertengahan 2026, rupiah melemah mendekati Rp18.000/US\$ dan IHSG terkoreksi 28 hingga 36 persen sejak awal tahun; investor asing mencatat jual bersih lebih dari Rp 66 triliun; analis pasar menyebutnya krisis kepercayaan, bukan sekadar koreksi siklikal. Dengan arus modal asing yang keluar secara drastis, Rupiah menjadi salah satu nilai tukar dengan performa paling buruk dibandingkan dengan nilai tukar berbagai negara berkembang (Grafik 11.16).



Grafik 11.16. Depresiasi Nilai Tukar Berbagai Negara (YTD per 12 Juli 2026)
Sumber: CEIC, diolah oleh LPEM FEB UI

- b) Program besar tanpa perencanaan matang: selain MBG, Badan Pengelola Investasi Danantara, yang mengelola aset lebih dari US\$900 miliar juga menghadapi sorotan tata

kelola: rangkap jabatan pimpinan, pengawasan eksternal lemah, dan risiko konflik kepentingan saat diusulkan masuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

- c) Komunikasi publik yang tidak konsisten: narasi resmi pemerintah kerap tidak sejalan dengan data dan persepsi pasar, memperbesar ketidakpastian dan mempercepat hilangnya kepercayaan.

Ketika pelaku pasar dan publik tidak dapat memprediksi konsistensi kebijakan dari waktu ke waktu, baik karena struktur kabinet yang kerap berubah, program besar yang diluncurkan tanpa kebijakan berbasis bukti, maupun komunikasi resmi yang berbeda dari kondisi riil, biaya kepercayaan yang harus dibayar bukan hanya berupa pelarian modal jangka pendek, tetapi juga pengurangan kapasitas negara untuk menjalankan agenda jangka menengah dan panjang secara konsisten.

Kesebelas temuan di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan semakin jauh bila dilihat dari berbagai indikator kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi masih bertumpu pada akumulasi faktor produksi, bukan bertumpu pada produktivitas. Disisi lain, arsitektur perlindungan sosial belum terwujud sebagai satu kesatuan yang menjangkau sepanjang hayat dan responsif terhadap kebutuhan dan meningkatnya kerentanan. Stabilitas makro, kredibilitas lembaga negara dan independensi institusi yang tercederai berakibat buruk pada reputasi global Indonesia. Di saat bersamaan terjadi penurunan kualitas kelembagaan. Partisipasi masyarakat sipil yang dilemahkan dalam berbagai pengambilan banyak keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak berakibat pada buruknya tata kelola peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa belum kokohnya kedua pilar pembangunan dan pondasi institusi untuk mencapai cita-cita institusi.

VISI

Indonesia yang dicita-citakan adalah negara yang pertumbuhan ekonominya berkualitas, inklusif dan berkelanjutan dan perlindungan sosialnya sepanjang hayat serta responsif terhadap perubahan (agile), dengan fondasi kelembagaan yang kredibel serta stabilitas makro ekonomi yang terjaga sebagai arsitektur permanen yang bertahan lintas siklus pemerintahan, ditopang mekanisme checks and balances yang berfungsi, dan partisipasi publik yang bermakna.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Rekomendasi berikut disusun sebagai panduan arah kebijakan (guardrails), bukan preskripsi teknis yang rinci, dan mengikuti tiga horizon waktu: mendesak, jangka menengah, dan jangka panjang.

Rekomendasi Jangka Pendek

Untuk rekomendasi kebijakan jangka pendek, kami mengusung kembali Tujuh Desakan Darurat Ekonomi (7DDE) yang disampaikan pada September 2025 lalu. Ketujuh desakan saat ini dalam proses penilaian berkala satu tahun. Penilaian dan evaluasi direncanakan untuk disampaikan ke

publik pada bulan September 2026. Walau sudah satu tahun, kami menganggap ketujuh desakan masih relevan, genting, dan komprehensif untuk menjadi masukan rekomendasi kebijakan ekonomi dalam jangka pendek.

Desakan 1: Perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran, tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional.

Desakan 2: Kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi kepentingan pada lembaga negara (Bank Indonesia, BPS, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPK, BPK, Kejaksaan).

Desakan 3: Hentikan dominasi negara yang melemahkan aktivitas ekonomi lokal, termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri sebagai penyelenggara dominan yang membuat pasar tidak kompetitif.

Desakan 4: Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi, dan sederhanakan birokrasi yang menghambat iklim usaha dan investasi.

Desakan 5: Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi.

Desakan 6: Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis, dan berantas program populis yang mengganggu prudensi fiskal.

Desakan 7: Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola serta demokrasi.

Rekomendasi Jangka Menengah

Selain itu, kami juga mengajukan beberapa rekomendasi jangka menengah yang didasari oleh perlunya membangun fondasi institusi dan stabilitas makro yang sehat dengan dua pilar pembangunan. Untuk pilar pertama berupa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, kami merekomendasikan pembangunan ekosistem inovasi dan pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan untuk pilar kedua berupa perlindungan sosial yang inklusif, kami mengusulkan pembangunan arsitektur perlindungan sosial sepanjang hayat. Untuk membangun fondasi institusi, kami merekomendasikan penguatan fondasi kelembagaan dan kredibilitas kebijakan melampaui sekedar respons krisis.

Rekomendasi jangka menengah berfokus pada pembangunan kapasitas struktural yang menopang kedua pilar secara berkelanjutan, dengan jangka waktu tiga hingga lima tahun ke depan, sebelum jendela bonus demografi mulai menyempit pada tahun 2030.

Bangun ekosistem inovasi dan pengembangan sumber daya manusia.

Dorong transformasi struktural dari sektor ekstraktif dan berbasis komoditas menuju manufaktur bernilai tambah tinggi dan jasa modern, melalui insentif investasi yang berbasis produktivitas, bukan proteksi berbasis TKDN semata, untuk membalikkan pola *premature deindustrialization*. Percepat implementasi penuh putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pembiayaan MBG dari anggaran pendidikan wajib, idealnya lebih cepat dari jadwal transisi APBN 2028, dan alokasikan pemulihan ruang fiskal tersebut untuk remunerasi dan kompetensi guru. Rancang

insentif yang mendorong migrasi tenaga kerja dari sektor informal ke sektor formal bernilai tambah tinggi.

Bangun Iklim Investasi yang *Contestable*.

Pastikan semua orang dapat membuka usaha bila menginginkan karena pada pasar yang *contestable*, hambatan bagi siapapun untuk masuk dan keluar dari pasar sangat rendah bagi pelaku usaha baru. Ini hanya dapat terjadi bila pemerintah memastikan tidak ada biaya yang tidak diperlukan. Berbagai macam pungutan yang tidak semestinya, termasuk pungutan tidak resmi harus dipangkas. Perlakuan khusus kepada BUMN dan Danantara juga harus ditiadakan. Ini akan menumbuhkan wirausaha yang akan menjadi pendorong inovasi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan.

Bangun Indonesia yang Tangguh Bencana

Kembalikan anggaran penanggulangan bencana pada porsi yang proporsional terhadap tingkat kerentanan Indonesia, integrasikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan infrastruktur dan tata ruang, dan pastikan arsitektur perlindungan sosial sepanjang hayat mencakup skema respons cepat bagi rumah tangga yang jatuh miskin akibat bencana iklim.

Bangun Indonesia yang Antisipatif dan Adaptif terhadap Perubahan Teknologi

Perubahan teknologi adalah keniscayaan. Pemerintah perlu berperan aktif dalam membentuk arah respon negara dan masyarakat terhadap perubahan teknologi. Iklim investasi yang *contestable*, ekosistem inovasi yang terbentuk dan sumber daya manusia yang berkualitas akan membuat Indonesia siap dengan berbagai perubahan teknologi yang tidak hanya diadopsi tapi juga dapat membawa Indonesia berpartisipasi dalam rantai nilai global produk berteknologi.

Bangun arsitektur perlindungan sosial sepanjang hayat dan agile.

Perkuat DTSEN sebagai basis data tunggal bagi seluruh program bantuan sosial dengan memastikan siklus pemutakhiran data bergerak lebih cepat daripada siklus perubahan kondisi ekonomi keluarga, untuk menekan *exclusion error*. Tutup dua celah siklus hidup paling rentan yang selama ini kosong, yaitu jaring pengaman bagi penduduk usia produktif yang kehilangan pekerjaan dan sistem pensiun yang benar-benar universal, tidak terbatas pada pekerja formal, mengikuti kerangka pendekatan siklus hidup dalam perlindungan sosial. Integrasikan MBG ke dalam arsitektur ini sebagai satu titik dalam rangkaian layanan sepanjang hayat, bukan program yang berdiri sendiri. Lengkapi sistem perlindungan sosial dengan deteksi dini dan penyaluran cepat pada saat guncangan terjadi.

Perkuat pondasi kelembagaan dan kredibilitas kebijakan melampaui respons krisis.

Institusionalisasi *Regulatory Impact Assessment* dan mekanisme pemantauan-evaluasi sebagai keharusan prosedural bagi setiap program strategis baru, bukan praktik ad hoc yang hanya muncul setelah krisis kepercayaan terjadi. Bangun rekam jejak konsistensi kebijakan dari waktu ke waktu, dalam pengertian kredibilitas kebijakan, melalui aturan fiskal dan moneter yang dapat diprediksi, bukan diskresi kasus per kasus. Rasionalisasi ukuran kabinet dan struktur kementerian berbasis evaluasi kinerja, bukan sekadar komposisi koalisi politik, sebagai bagian

dari membangun kapasitas negara untuk mengkoordinasikan agenda lintas sektor secara konsisten.

Ekosistem inovasi tidak akan tumbuh tanpa kepastian kebijakan, perlindungan sosial sepanjang hayat tidak akan fiskal berkelanjutan tanpa disiplin anggaran yang kredibel, dan keduanya tidak akan berjalan tanpa kapasitas kelembagaan yang mampu mengkoordinasikan pelaksanaannya lintas kementerian dan lintas waktu pemerintahan.

Rekomendasi Jangka Panjang

Untuk jangka panjang, kami memahami negara perlu memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat fleksibel namun juga tangguh dalam menghadapi berbagai gejolak perubahan maupun ketidakpastian. Oleh karena itu, kami menekankan pentingnya lanskap kebijakan yang dapat berjalan dengan konsisten dan memiliki ruang untuk penyempurnaan dengan proses monitoring dan evaluasi yang kredibel tanpa terbelenggu dengan siklus politik. Dalam hal ini, kami menekankan peran dari berjalannya *check and balance* serta partisipasi publik yang bermakna dalam menentukan arah kebijakan dan program.

Pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas karena bertumpu pada akumulasi faktor produksi bukan produktivitas, perlindungan sosial yang belum sepanjang hayat dan belum berbasis permintaan, serta fondasi kelembagaan yang belum kredibel dan konsisten dari waktu ke waktu, pada dasarnya adalah satu persoalan yang sama dilihat dari tiga sudut: **negara belum secara sistemik mengaitkan kebijakan hari ini dengan konsekuensinya sepuluh hingga dua puluh tahun ke depan**. Agenda jangka panjang adalah komitmen pemerintah untuk menjadikan ketiga elemen tersebut sebagai **arsitektur permanen**, yang bertahan lintas siklus pemerintahan lima tahunan, bukan agenda yang harus dibangun ulang dari nol setiap kali terjadi pergantian kekuasaan.

Tiga elemen ini saling mengunci dan tidak dapat dicapai secara terpisah. Tanpa transisi struktural dari pertumbuhan berbasis akumulasi modal dan tenaga kerja menuju pertumbuhan berbasis produktivitas dan inovasi, Indonesia berisiko menetap dalam jebakan pendapatan menengah, sebagaimana ditunjukkan pola *premature deindustrialization* yang sudah tampak pada sektor manufaktur dan kontribusi TFP. Tanpa arsitektur perlindungan sosial yang benar-benar menjangkau sepanjang hayat, bonus demografi yang tersisa hingga sekitar 2030 akan terlewat tanpa termanfaatkan optimal, dan celah pada usia produktif serta lanjut usia akan berubah dari risiko menjadi beban fiskal nyata tepat ketika ruang fiskal menjadi sempit. Dan tanpa kredibilitas kebijakan yang terjaga lintas rezim pemerintahan, dalam pengertian konsistensi yang dapat diprediksi pelaku pasar dan publik, kedua agenda di atas akan terus terganggu oleh krisis kepercayaan yang berulang, sebagaimana yang saat ini tengah dialami.

Keberhasilan jangka panjang bukan pencapaian satu indikator tunggal pada satu titik waktu, melainkan **konsistensi arah** ketiga elemen tersebut dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya: apakah pertumbuhan yang dicapai semakin ditopang produktivitas dan bukan sekadar akumulasi faktor; apakah cakupan perlindungan sosial semakin mendekati "sepanjang hayat" dan "berbasis permintaan", bukan sebaliknya semakin terfragmentasi menurut kepentingan program populis yang silih berganti; dan apakah lembaga-lembaga negara semakin independen dan dapat diprediksi, bukan semakin rentan terhadap intervensi kepentingan jangka pendek; apakah mekanisme *check and balance* serta partisipasi publik berfungsi sebagai koreksi

yang nyata, bukan formalitas. Selama ketiga arah ini konsisten dijaga, Indonesia bergerak mendekati, bukan menjauhi, cita-cita konstitusional kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjelang satu abad kemerdekaannya pada 2045.

PENUTUP

Indonesia belum berpijak kokoh pada dua pilar penopang cita-cita konstitusional. Kesejahteraan dasar belum tercapai, kualitas sumber daya manusia tertinggal akibat, salah satunya, ruang fiskal pendidikan yang justru diarahkan untuk membiayai program di luar mandat konstitusionalnya, dan pertumbuhan ekonomi masih bertumpu pada akumulasi faktor produksi alih-alih produktivitas, tercermin dari deindustrialisasi dini dan kontribusi Total Factor Productivity yang nyaris nihil. Arsitektur perlindungan sosial belum dirancang sebagai satu kesatuan yang menjangkau sepanjang hayat dan responsif terhadap permintaan. Sementara itu fondasi kelembagaan dan stabilitas makro juga tercederai oleh kebijakan yang tidak berpijak pada bukti dan tidak konsisten dari waktu ke waktu.

Sebelas temuan dalam risalah kebijakan ini bukan sekadar daftar persoalan yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan menunjukkan satu pola yang sama: kebijakan yang dirancang dan dijalankan tanpa keterkaitan yang matang antara satu keputusan dengan konsekuensinya di masa depan. Pola ini mendasari rekomendasi kebijakan yang saling menopang. Tujuh Desakan mendesak menuntut koreksi segera atas misalokasi anggaran, independensi lembaga negara, dominasi negara yang melemahkan ekonomi lokal, birokrasi yang menghambat investasi, ketimpangan yang belum tertangani, kebijakan yang minim bukti, serta kualitas institusi dan kepercayaan publik yang terus tergerus. Rekomendasi jangka menengah bertujuan untuk membangun kapasitas struktural pada ketiga elemen sekaligus, yaitu ekosistem inovasi dan sumber daya manusia, arsitektur perlindungan sosial sepanjang hayat dan kredibilitas kebijakan yang melampaui respons krisis semata bagi fondasi keduanya. Sementara itu, rekomendasi jangka panjang menuntut ketiga elemen ini dijadikan arsitektur permanen yang bertahan lintas siklus pemerintahan, bukan sekadar prioritas satu rezim yang berganti setiap lima tahun.

Tolok ukur keberhasilan bukan pencapaian satu indikator tunggal pada satu titik waktu, melainkan konsistensi arah dari waktu ke waktu: pertumbuhan Indonesia semakin ditopang produktivitas, perlindungan sosial semakin mendekati sepanjang hayat dan berbasis permintaan, dan lembaga negaranya semakin independen dan dapat diprediksi. Selama arah ini konsisten dijaga, Indonesia bergerak mendekati, bukan menjauhi, cita-cita konstitusionalnya menjelang satu abad kemerdekaan pada 2045.

DAFTAR RUJUKAN

- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2019). Automation and new tasks: How technology displaces and reinstates labor. *Journal of economic perspectives*, 33(2), 3-30.
- Acemoglu, D. & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Crown Business.
- Cherif, R., & Hasanov, F. (2025). Industrial policy, Asian miracle style. *Journal of Economic Perspectives*, 39(4), 101-125.

- CISDI Secretariat. (2025). *Seri kedua kajian Makan Bergizi Gratis: Pentingnya penguatan tata kelola, regulasi, dan monitoring evaluasi pada Program Makan Bergizi Gratis*. Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI). [CISDI publication page](#)
- CISDI Secretariat. (2025, September 18). *Picu 5.626 kasus keracunan, CISDI mendesak Presiden Prabowo segera moratorium dan evaluasi menyeluruh Program MBG*. Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI). [CISDI publication page](#)
- Gupta, K., Laksono, R., & Siregar, R. N. (2026). Prabowonomics: Can Indonesia Really Grow at 8%?. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 62(1), 1-35.
- Hampole, M., Papanikolaou, D., Schmidt, L. D., & Seegmiller, B. (2025). *Artificial intelligence and the labor market* (No. w33509). National Bureau of Economic Research.
- Hata, A., Kim, S., & Nomura, S. (2024). *Learning in the shadow of the pandemic: COVID-19 learning loss and widening learning disparities in Indonesia*. World Bank. [World Bank report](#).
- LPEM FEB UI. (2025). *Indonesia Economic Outlook Q2-2025*. LPEM FEB UI Publication.
- Maddawin, A., Morgan, P., Park, A., Suryadarma, D., Trinh, L., & Vandenberg, P. (2024). *Learning disruptions during the COVID-19 pandemic: Evidence from household surveys in Southeast Asia*. ADBI Working Paper No. 1442. Asian Development Bank Institute. <https://doi.org/10.56506/YZMJ3763>
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press
- PANRB (2026), Mensos Jelaskan Alasan Penonaktifan 13,5 Juta PBI JKN, Reaktivasi Dibuka, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/mensos-jelaskan-alasan-penonaktifan-13-5-juta-pbi-jkn-reaktivasi-dibuka>
- Purnamasari, R. S., Satyaka, P. H., Suharti, Wai-Poi, M., & Afkar, R. (2022). COVID-19 and education in Indonesia: When school reopening is not enough to avert losing a generation. In S. M. Indrawati, S. Nazara, T. Anas, C. F. Ananda, & K. Verico (Eds.), *Keeping Indonesia safe from the COVID-19 pandemic: Lessons learnt from the National Economic Recovery Programme* (pp. 352–379). ISEAS Publishing.
- Ridhwan, M. M., Suryahadi, A., Rezki, J. F., & Pekerti, I. S. (2021). *The labor market impact of COVID-19 and the role of e-commerce development: Evidence from Indonesia* (Working Paper No. WP/10/2021). Bank Indonesia.
- Ridhwan, M. M., Rezki, J. F., Suryahadi, A., Ramayandi, A., & Ismail, A. (2024). The impact of COVID-19 lockdowns on household income, consumption and expectations: Evidence from high-frequency data in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 60(1), 67-94.
- Satriawan, E., & Nugroho, W. S. (2025, October 16). *Feeding ambition, missing precision: Rethinking Indonesia's free meal program*. Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada. <https://feb.ugm.ac.id/en/faculty-insight/17244-feeding-ambition-missing-precision-rethinking-indonesias-free-meal-program>



Terima kasih telah membaca kajian ini.

FIAD terbuka bagi siapa saja yang memiliki kepedulian, pengetahuan, pengalaman, atau keahlian yang ingin dibagikan untuk kepentingan publik.

Gabung di bit.ly/GabungFIAD